

Kata Pengantar

Syukur Alhamdulillah pelaksanaan pekerjaan survey “Survey tingkat melek politik pemilih pemula dalam Pemilu pada Gresik tahun 2015” sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Semua ini tidak lepas dari kerjasama tim survey, baik pekerjaan lapangan, input data hingga penulisan yang sesuai dengan jadwal.

Ada empat tahapan penting dalam pelaksanaan survey ini. Pertama penyusunan disain dan instrumen. Kedua, penyebaran instrumen dan pengumpulannya. Ketiga, input dan analisis data. Keempat penulisan dan cetak laporan.

Kegiatan riset dengan menggunakan teknik survey jangan diasumsikan sebagaimana survey yang dikenal luas di masyarakat terutama pada saat menjelang atau pasca perhelatan Pilpres, Pilkada maupun Pileg. Dimana kegiatan tersebut dilaksanakan dengan laporan yang sederhana dan tidak memerlukan tingkat ketelitian penulisan laporan. Sementara dalam survey akademik semacam ini memerlukan waktu, perhatian dan tingkat kesulitan yang berbeda. Karena dihadapkan oleh kajian akademik yang tuntas, begitu pula cara penyajian dan penulisannya. Sehingga laporan yang dihadirkan seperti laporan akademik umumnya, sebagaimana penulisan Skripsi, Tesis hingga Disertasi.

Atas semua persoalan tersebut, peneliti melaluinya dengan senang hati, tanpa mempertimbangkan seberapa besar *reward* yang diterima. Karena bagaimanapun peneliti berharap melalui riset ini, demokrasi Indonesia akan berjalan semakin baik, terutama melalui regulator KPU di semua tingkatan.

Selamat menikmati hasil survey dan kajian ini.

Gresik, 10 Agustus 2015

Peneliti/Konsultan

Dr. Abdul Chalik

DAFTAR ISI

Cover dalam

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Permasalahan
- C. Tujuan
- D. Out put dan Manfaat
- E. Metode penelitian
- F. Sistematika Pembahasan

Bab II Kajian Tentang Melek Politik Masyarakat

- A. Pendidikan politik
- B. Budaya politik
- C. Hubungan pendidikan dan budaya politik dengan melek politik

Bab III Penyajian dan Analisis Data

- A. Penyajian Data
 - 1. Gambaran umum lokasi penelitian
 - a. Gambaran geografis Kota Mojokerto
 - b. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu
 - c. Gambaran sampel penelitian
 - 2. Pengetahuan tentang Pemilu
 - 3. Pengetahuan tentang Calon yang dipilih dalam Pemilu
 - 4. Pengetahuan tentang tata cara mencoblos
- B. Temuan dan Analisis

Bab IV Penutup

- A. Kesimpulan
- B. Rekomendasi

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tahun 2015 merupakan tahun dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak di Jawa Timur. Setidaknya terdapat 16 Kabupaten/Kota yang akan menyelenggarakan hajatan politik lima tahunan ini. Salah satu Kabupaten/Kota tersebut adalah Kabupaten Gresik.

Isu utama dalam Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terkait dengan partisipasi politik yang mengalami naik turun. Yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah aktifitas yang dilakukan oleh individu warga Negara untuk mempengaruhi pilihan orang untuk posisi pemerintahan dan/atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan mereka sebagai pejabat pemerintah.¹ Partisipasi dalam arti yang sederhana adalah ikut Pemilu (voter turnout) dan ikut serta dalam kampanye-kampanye Pemilu, aksi damai maupun aksi dengan menggunakan kekerasan.²

Partisipasi politik pemilih mengalami pasang surut sejak Pemilu pertama kali tahun 1955. Partisipasi tertinggi pada tahun 1993 yang mencapai 93 %, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Pemilu 1955 yang mencapai 87 %. Kemudian mengalami penurunan pada Pemilu 2004 yang mencapai angka 84, 9 %, dan Pemilu 2009 turun drastis mencapai 70,99 %.³ Sementara pada Pemilu 2014 merupakan titik nadir terendah yang mencapai 70, 2 % atau setara dengan angka Golput yang mencapai 29, 8 %.

Secara normatif dan empiris, berbagai alasan yang menjadi penyebab ketidakaktifan masyarakat dalam Pemilu. Salah satunya adalah tingkat pengetahuan masyarakat terhadap Pemilu yang cukup rendah. Dimana Pemilu dipandang sebagai kegiatan rutinitas yang tidak akan banyak memberikan dampak pada perubahan masyarakat. Pemilu dipandang sebagai kegiatan pemerintah atau perorangan yang punya kepentingan langsung dengan urusan Pemilu, bukan kegiatan secara bersama.

Partisipasi yang rendah terutama datang dari kalangan pemilih pemula, yakni pemilih yang baru pertama kali ikut Pemilu. Jumlah pemilih pemula dari tahun ke tahun terus meningkat. Berdasarkan hasil catatan Badan Pusat Statistik, pemilih pemula atau yang berumur 17-24 tahun pada tahun 2004 mencapai 24 juta dari 147 juta pemilih secara nasional. Pada Pemilu 2009 naik menjadi 36 juta dari 171 juta pemilih, dan pada Pemilu 2014 diperkirakan sudah mencapai 40 juta.

¹ Michael Rush, Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, ter. (Jakarta:Raja Grafindo Persada), 121.

² Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrindo Ambardi, *Kuasa rakyat* (Jakarta:Mizan, 2011), 81.

³ Ibid. 89.

Pemilih pemula memiliki karakteristik sendiri. Sisi lain banyak usia terpelajar atau sudah bekerja, sisi lain muncul sikap apatis terhadap politik. Segmen pemilih pemula memiliki tingkat pengetahuan yang berbeda dengan pemilih yang sudah berpengalaman.

Survey ini dimaksudkan untuk memetakan dari awal partisipasi politik pemilih pemula di Kabupaten Gresik yang diukur dari tingkat pengetahuan terhadap politik. Hasil penelitian diharapkan dapat menggambarkan tentang pengetahuan masyarakat terhadap Pilkada Kabupaten Gresik.

B. Permasalahan

Permasalahan penelitian ini adalah; (1) Bagaimana tingkat pengetahuan pemilih pemula terhadap politik (Pemilihan Kepala daerah); (2) Apa yang menjadi dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan masyarakat tentang Pilkada

C. Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai adalah (1) Untuk mengetahui tingkat pengetahuan pemilih pemula tentang Pilkada di Kabupaten Gresik; (2) Untuk mengetahui dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan pemilih pemula tentang Pilkada

D. Out Put dan Manfaat

Adapun manfaat dan out put yang diharapkan adalah :

1. Tersedianya dokumen akademik kajian pengetahuan pemilih pemula tentang Pilkada dari sudut pandang mereka berupa tingkat pengetahuan tentang Pilkada, dasar dan faktor terbentuknya pengetahuan serta tingkat partisipasinya.
2. Dokumen akademik selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar dan alat dalam menentukan kebijakan strategis di bidang Kepemiluan, baik oleh KPU, KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota terutama KPU Kabupaten Gresik.

E. Kajian Konsep

Dalam demokrasi modern, pengetahuan (melek) terhadap politik merupakan keniscayaan. Masyarakat dituntut untuk mengenal lebih mendalam tentang arti pentingnya sebuah politik, partai politik, politik kenegaraan, kebangsaan, kebirokrasian dan politik dalam arti yang sangat luas. Masyarakat yang berada di suatu Negara, harus memahami tugas dan fungsinya, sehingga ada hubungan timbal balik antara masyarakat dengan aparatur negara.

Partisipasi merupakan salah satu bentuk dari melekat politik masyarakat, yakni ketika secara langsung maupun tidak langsung mengambil peran dalam perjalanan suatu bangsa dan negara. Partisipasi politik adalah kegiatan warganegara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh negara ataupun partai yang berkuasa.

Definisi partisipasi politik yang cukup senada disampaikan oleh Silvia Bolgherini. Menurut Bolgherini, partisipasi politik " ... *a series of activities related to political life, aimed at influencing public decisions in a more or less direct way—legal, conventional, pacific, or contentious.*⁴ Bagi Bolgherini, partisipasi politik adalah segala aktivitas yang berkaitan dengan kehidupan politik, yang ditujukan untuk memengaruhi pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung -- dengan cara legal, konvensional, dan damai.

Partisipasi politik merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga Negara yang baik (*good citizen*) dalam ikut serta menentukan arah bangsa dan negara. Salah satu bentuk partisipasi tersebut adalah ikut serta dalam Pemilihan, baik Pileg, Pilpres, maupun Pilkada.

Salah satu yang membentuk partisipasi politik adalah tingkat kesadaran masyarakat terhadap politik. Kesadaran dibentuk oleh tingkat pengetahuan mereka terhadap pentingnya politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap politik, maka semakin tinggi pula kesadaran mereka terhadap politik. Namun demikian bukan berarti tingkat pengetahuan berbanding lurus dengan kehadiran dalam pemilihan umum, atau partisipasi melalui media *on line*. Kesadaran dalam pengertian di atas berarti kesadaran terhadap tanggung jawabnya sebagai warga Negara.

Pengetahuan terhadap politik ditandai dengan pengetahuan terhadap politik representasi dan arti penting seorang pemimpin yang dipilih secara demokratis. Demikian pula pengetahuan politik terkait dengan kemampuan, kemauan dan kesempatan dalam mengakses informasi dalam aktifitas politik.

⁴ Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept* (Chicago: The University of Chicago, 2010), 169.

Dalam proses dan aktifitas politik yang menyangkut kepentingan bernegara, informasi disediakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh pemerintah. Dalam konteks Indonesia, terdapat Komisi Pemilihan Umum (KPU) mulai tingkat pusat hingga Kabupaten/Kota. Lembaga ini yang menjadi regulator, operator penyelenggaraan Pemilu, termasuk di dalamnya menyampaikan informasi kepada masyarakat. Lembaga ini menjadi sangat vital dalam penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

F. Metode penelitian

1. *Pendekatan penelitian.* Penelitian akan menggunakan metode kuantitatif berupa generalisasi atas asumsi umum yang dituangkan dalam pilihan kuesioner/angket.
2. *Sampel dan teknik sampling.* Penelitian ini akan dilakukan di tiga wilayah Kabupaten Gresik, sesuai dengan karakteristiknya. Wilayah tersebut meliputi wilayah Selatan yang representasi kawasan pertanian, sebagian abangan, dan buruh pabrik. Wilayah tengah merupakan kawasan urban dan suburban, karakter santri cukup kuat dan banyak pekerja pabrik dan profesional. Kawasan utara dengan karakteristik wilayah perikanan dan pesisir, nuansa santri sangat kental.
Teknik pengambilan sampel menggunakan *cluster-multistage random sampling*, yakni teknik pengambilan sampel secara acak dengan cara mengambil keterwakilan semua sampel penelitian berdasarkan umur, latar belakang pendidikan dan latar belakang pekerjaan orang tua.
3. *Analisis data.* Semua data akan ditabulasi dan dianalisis menggunakan SPSS 17.0 dan selanjutnya akan dilakukan interpretasi.

G. Sistematika Pelaporan

Pada bagian awal akan diuraikan tentang latar belakang penelitian, permasalahan, tujuan dan manfaat, metode penelitian serta sistematika pembahasan.

Pada bagian kedua akan dijelaskan tentang teori-teori yang akan diuji serta penjelasannya.

Pada bagian ketiga akan diuraikan tentang penyajian data, temuan dan analisis.

Pada bagian keempat kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

PEMILIH PEMULA DALAM BUDAYA POLITIK DI INDONESIA

Kajian tentang melek politik pemilih pemula tidak dapat dilepaskan dari persoalan pendidikan politik dan budaya politik. Kedua aspek tersebut sangat menentukan terhadap pemahaman dan kematangan setiap warga Negara dalam berpolitik. Begitu pula, dapat berdampak pada partisipasi atau keikutsertaan dalam politik.

A. Pemilih Pemula dan karakteristiknya

Tidak ada landasan teoritik yang kuat tentang konsep pemilih pemula. Yang ada hanyalah pembatasan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang masing-masing negara memiliki sudut pandang dan batasan tersendiri. Demikian pula yang terjadi di Indonesia.

Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang telah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin. Bertolak dari norma hukum ini, pemilih pemula dapat didefinisikan sebagai para pemilih yang baru pertama kali terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disingkat pemilu legislatif atau pileg). Mereka terdaftar tetapi belum tentu datang ke tempat pemungutan suara (TPS). Atau, mereka datang ke tempat pemungutan suara (TPS) hanya sebagai penonton atau mencoblos dengan benar dan rasional atau mencoblos dengan benar tetapi emosional atau salah mencoblos surat suara sehingga suaranya menjadi tidak sah.

Pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak politik untuk memilih dalam pemilu. Akan tetapi, hak itu harus diatur dengan cara menetapkan syarat tertentu agar terjadi keteraturan dalam proses politik. Syarat tersebut antara lain merupakan WNI yang berusia minimal 17 tahun, sudah/pernah menikah, tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya, terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), bukan anggota TNI/Polri aktif, tidak sedang dicabut hak pilihnya, khusus untuk Pemilukada, calon pemilih harus berdomisili sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan di daerah yang bersangkutan.

Di antara syarat tersebut, yang paling penting mendapat perhatian adalah harus terdaftar sebagai pemilih. Untuk terdaftar sebagai pemilih, Pemilih Pemula harus mempunyai KTP. Meskipun sudah memenuhi syarat-syarat untuk menjadi pemilih namun tidak terdaftar sebagai pemilih, Pemilih Pemula tidak bisa ikut memilih. Jika tidak terdaftar sebagai pemilih, Pemilih Pemula harus melapor pada Petugas Pemungutan Suara melalui RT atau RW tempat tinggal pemilih.

Secara psikologis, Pemilih Pemula memiliki karakteristik yang berbeda dengan orang-orang tua pada umumnya. Pemilih Pemula cenderung kritis, mandiri, independen, anti status quo atau tidak puas dengan kemapanan, pro perubahan dan sebagainya. Karakteristik itu cukup kondusif untuk membangun komunitas pemilih cerdas dalam pemilu yakni pemilih yang memiliki pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya. Misalnya karena integritas tokoh yang dicalonkan partai politik, *track record*-nya atau program kerja yang ditawarkan.

Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, Pemilih Pemula perlu mengetahui dan memahami berbagai hal yang terkait dengan pemilu. Misalnya untuk apa pemilu diselenggarakan, apa saja tahapan pemilu, siapa saja yang boleh ikut serta dalam pemilu, bagaimana tata cara menggunakan hak pilih dalam pemilu dan sebagainya. Pertanyaan itu penting diajukan agar Pemilih Pemula menjadi pemilih cerdas dalam menentukan pilihan politiknya di setiap pemilu.

Di era zaman internet seperti dewasa ini, sosok pemilih pemula (pelajar dan mahasiswa) merupakan lapisan masyarakat Indonesia yang paling banyak bersentuhan dengan teknologi komunikasi dan informasi berbasis internet. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada 2012 mencapai angka 63 juta. Penetrasinya sudah mencapai 24,23% dari total populasi penduduk Indonesia. Dari total ini, 64,2 persen pengguna internet didominasi usia 12-34. Dari sisi perangkat yang digunakan, 70,1% mengakses internet dari smartphone, 45,4% dari notebook, 41% dari PC, 5,6% dari netbook, dan 3,4% lagi dari tablet. Meningkatnya akses internet secara mobile didorong semakin banyaknya ponsel pintar dengan harga yang kian terjangkau (<http://tekno.liputan6.com>).

Aktivitas apa yang mereka lakukan tatkala terhubung dengan internet? Menurut hasil survey Kementerian Informasi dan Komunikasi (KEMENINFO), aktivitas yang paling sering dilakukan ketika berselancar di internet adalah (a) membuka situs jejaring sosial (64.43 persen), terutama Facebook; (b) mencari informasi mengenai barang/jasa (48.55 persen); (c) mengirim dan menerima email (47.33 persen); (d) mengunduh film/gambar (46.98 persen); (e) mengirim pesan melalui instant messaging (46.74 persen); (f) melakukan aktivitas belajar (44.34 persen); (g) bermain game (44.01 persen); (h) mencari informasi kesehatan (38.80); (i) membaca atau mengunduh online newspaper (37.70 persen); (j) mencari informasi mengenai organisasi pemerintahan (28.30 persen); (k) mengunduh software (19.41 persen); (l) menjual atau membeli barang dan jasa (15.35 persen); (m) internet banking (11.32 persen); (n) teleconference melalui VoIP (5.60 persen); (o) lainnya (2.96 persen) (Kementerian Informasi dan Komunikasi, 2011:24-Tetapi, kepemilikan dan akses penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) ini lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa.⁵

⁵ Alamsyah, "Pemilih Pemula dalam Pemilu 2014", Ekspres Pos, 18 September 2014.

Fakta ini tidak mengherankan karena mayoritas populasi penduduk dan aktivitas pemerintahan, perdagangan dan industri terkonsentrasi di Pulau Jawa. Data ini menunjukkan bahwa kesenjangan akses dan penggunaan TIK tidak hanya terjadi antar wilayah, antar kelompok umur, tetapi juga dalam sesama kelompok populasi yang memiliki akses dan menggunakan TIK. Meskipun begitu, tingginya penetrasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis internet dan dinamisnya hubungan antara para pemilih pemula dengan perkembangan teknologi TIK di Tanah Air merupakan berita gembira yang tak bisa disangkal siapapun. Situasi ini menciptakan peluang bagi bangsa Indonesia di masa depan untuk melaksanakan proses pemilihan umum berbasis elektronik (eElection). Meskipun perlu perubahan seperangkat aturan tentang kepemiluan, partai politik, dan sikap para multipihak terhadap mekanisme ini, tetapi fakta sosiologis bangsa Indonesia hari ini menunjukkan beberapa tahun mendatang kita sudah siap untuk melaksanakane Election.

Dalam penghitungan suara pemilu, satu suara saja sangat berarti karena bisa mempengaruhi kemenangan politik. Apalagi suara yang berjumlah jutaan sebagaimana halnya yang dimiliki kalangan Pemilih Pemula. Itu sebabnya, dalam setiap pemilu, Pemilih Pemula menjadi "rebutan" berbagai kekuatan politik. Menjelang pemilu, partai politik atau peserta pemilu lainnya, biasanya membuat iklan atau propaganda politik yang menarik para Pemilih Pemula. Mereka juga membentuk komunitas kalangan muda dengan aneka kegiatan yang menarik anak-anak muda, khususnya Pemilih Pemula. Tujuannya agar para Pemilih Pemula tertarik dengan partai atau kandidat tersebut dan memberikan suaranya dalam pemilu untuk mereka sehingga mereka dapat mendulang suara yang signifikan dan meraih kemenangan.

Selain memiliki banyak kelebihan, Pemilih Pemula juga memiliki kekurangan, yakni belum memiliki pengalaman memilih dalam pemilu. Pemilu mendatang merupakan pengalaman pertama bagi pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya. Karena belum punya pengalaman memilih dalam pemilu, pada umumnya banyak dari kalangan mereka yang belum mengetahui berbagai hal yang terkait dengan pemilihan umum. Mereka juga tidak tahu bahwa suaranya sangat berarti bagi proses politik di negaranya. Bahkan tidak jarang mereka enggan berpartisipasi dalam pemilu dan memilih ikut-ikutan tidak mau menggunakan hak pilihnya alias golongan putih (golput).

Temuan Lembaga Peduli Remaja (LPR) Kriya Mandiri Solo yang melakukan jajak pendapat pada Pemilih Pemula di Kota Solo tanggal 19 Februari 2009, menyatakan bahwa potensi golput Pemilih Pemula di Solo cukup tinggi. Dari 340 responden yang dipilih secara acak dari sepuluh SMA dan SMK di Solo, hanya 21,49% saja yang menyatakan siap memberikan suara. Sisanya 60,51% menyatakan belum yakin apakah akan memilih atau tidak, artinya berpotensi golput, dan 18% dengan tegas menyatakan tidak memilih.

Hasil survei juga menunjukkan 67,55% Pemilih Pemula belum mengetahui secara persis tahapan dan sistem pemilu. Tidak hanya itu, sebanyak 76,40% bahkan mengaku tidak tahu jumlah kontestan partai politik. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketertarikan pemilih pemula untuk berpartisipasi pada Pemilu 2009 lalu masih sangat rendah. Sikap ini terlihat dari 91,01% responden menyatakan tidak bersedia turut serta dalam kegiatan kampanye.⁶

Jumlah pemilih pemula dari tahun ke tahun cukup signifikan. Berapa jumlah populasi penduduk Indonesia yang berusia 17 –21 tahun? Sulit menjawab pertanyaan ini karena publikasi statistik memiliki penggolongan umur tersendiri. Dalam publikasi Statistik Indonesia 2012 yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) Republik Indonesia, para pemilih pemula termasuk dalam golongan umur 15 –19 tahun dan 20 –24 tahun. Golongan umur 15-19 tahun berjumlah 22.438.903 jiwa dan golongan umur 20 tahun mencapai 19.018.911 jiwa (BPS RI, 2012: 126-127). Total populasi penduduk yang berumur 15 –24 tahun mencapai 41.457.814 jiwa. Data ini tidak sepenuhnya tepat karena batas bawah yang digunakan adalah umur 15 (lima belas) tahun (selisih dua tahun dengan angka 17 tahun yang puluh empat) tahun (selisih tiga tahun dengan angka 21 yang merupakan batas atas kelas pemilih pemula). Meskipun begitu, data ini tetap memberikan gambaran kasar jumlah populasi pemilih pemula.

Sementara itu, mengacu ke data BKKBN (2013: 56), kelompok para pemilih pemula (17-21 tahun) berada dalam golongan umur 16-21 tahun yang berjumlah 29.855.479 jiwa, atau 13 persen dari total penduduk Indonesia yang bertengger di angka 237.896.180 jiwa. Jumlah populasi penduduk Indonesia menurut BKKBN ini lebih besar dari hasil Sensus Penduduk 2010 yang menunjuk angka 205.132.548 jiwa. Selisih 32.763.632 juta jiwa antara data Sensus Penduduk 2010 dan data BKKBN diduga akibat pertambahan penduduk pada 2011-2012 yang tidak terpotret selama pelaksanaan Sensus Penduduk 2011 Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri, total populasi penduduk Indonesia mencapai 259.940.857 jiwa(Kompas, 19 September 2011).

Data BKKBN lebih bisa dipercaya karena pengelompokan umur (16-21 tahun) yang digunakannya hampir mirip dengan pengelompokan umur kelas pemilih pemula (17-21 tahun). Yang berbeda hanyalah batas bawahnya. Data BKKBN tersebut berasal dari kegiatan Pendataan Keluarga Tahun 2012 yang berhasil mewawancarai rumah tangga sebanyak 99.21 persen dari 58.900.015 juta rumah tangga di Indonesia. Sayangnya, publikasi BKKBN tidak menyediakan lebih jauh informasi tentang aspek sosial-ekonomi kelompok umur 16-21 tahun. Meski kurang akurat, publikasi Statistik Indonesia 2012 menyatakan bahwa sebagian besar para pemilih pemula adalah pekerja dan pengangguran terbuka. Jika mereka

⁶ "Pemilih Pemula", Antara.Com. (2 Januari 2015)

bukan angkatan kerja, maka mereka bersekolah atau mengurus rumah tangga.⁷

Dimensi lain yang diungkapkan publikasi Statistik Indonesia 2012 adalah partisipasi sekolah. Proporsi kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun yang masih sekolah lebih banyak di kota daripada di desa. Sebaliknya, kelompok umur 15-19 dan 20-24 tahun yang tidak sekolah lagi lebih banyak di desa daripada di kota. Proporsi penduduk berumur 15-19 dan 20-24 tahun, baik yang berdomisili di kota dan/atau desa, yang tidak bersekolah lagi lebih banyak daripada mereka yang masih sekolah. Data ini menunjukkan bahwa lokasi geografis (desa versus kota) berpengaruh terhadap partisipasi pendidikan.

B. Pendidikan Politik

Istilah pendidikan politik dalam Bahasa Inggris sering disamakan dengan istilah *political socialization*. Istilah *political socialization* jika diartikan secara harfiah ke dalam bahasa Indonesia akan bermakna sosialisasi politik. Oleh karena itu, dengan menggunakan istilah *political socialization* banyak yang mensinonimkan istilah pendidikan politik dengan istilah Sosialisasi Politik, karena keduanya memiliki makna yang hampir sama. Dengan kata lain, sosialisasi politik adalah pendidikan politik dalam arti sempit.

Menurut Ramlan Surbakti, dalam memberikan pengertian tentang pendidikan politik harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai sosialisasi politik. Surbakti (1999:117) berpendapat bahwa:

Sosialisasi politik dibagi dua yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogik diantara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah, dan partai politik.

Pendapat di atas secara tersirat menyatakan bahwa pendidikan politik merupakan bagian dari sosialisasi politik. Pendidikan politik mengajarkan masyarakat untuk lebih mengenal sistem politik negaranya. Dapat dikatakan bahwa sosialisasi politik adalah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses sosialisasi politik inilah para anggota masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap kehidupan politik yang berlangsung dalam masyarakat.

Kedua pendapat di atas mengungkapkan bahwa pendidikan politik adalah suatu bentuk pendidikan yang dijalankan secara terencana dan disengaja baik dalam bentuk formal maupun informal yang mencoha

⁷ Alamsyah, "Pemilih Pemula dalam Pemilu 2014", Ekpress Pos, 18 September 2014.

untuk mengajarkan kepada setiap individu agar sikap dan perbuatannya dapat sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku secara sosial. Dalam hal ini dapat terlihat bahwa pendidikan politik tidak hanya mempelajari sikap dan tingkah laku individu. Namun pendidikan politik mencoba untuk mengaitkan sikap dan tingkah laku individu tersebut dengan stabilitas dan eksistensi sistem politik.

Kartini Kartono (1990:vii) memberikan pendapatnya tentang hubungan antara pendidikan dengan politik yaitu "pendidikan dilihat sebagai faktor politik dan kekuatan politik. Sebabnya, pendidikan dan sekolah pada hakekatnya juga merupakan pencerminan dari kekuatan-kekuatan sosial-politik yang tengah berkuasa, dan merupakan refleksi dari orde penguasa yang ada".

Berdasarkan pendapat di atas, dapat kita ketahui bahwa pendidikan dan politik adalah dua unsur yang saling mempengaruhi. Pengembangan sistem pendidikan harus selalu berada dalam kerangka sistem politik yang sedang dijalankan oleh pemerintahan masa itu. Oleh karena itu segala permasalahan yang terjadi di dunia pendidikan akan berubah menjadi permasalahan politik pada saat pemerintah dilibatkan untuk memecahkannya.

Fungsi pendidikan politik sangat penting sebab pendidikan politik meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang kehidupan politik yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik.

Merujuk pada beberapa pengertian pendidikan politik yang telah disebutkan sebelumnya, maka pendidikan politik mempunyai dua tujuan utama. *Pertama*, fungsi pendidikan politik adalah untuk mengubah dan membentuk tata perilaku seseorang agar sesuai dengan tujuan politik yang dapat menjadikan setiap individu sebagai partisipan politik yang bertanggung jawab. *Kedua*, fungsi pendidikan politik dalam arti yang lebih luas untuk membentuk suatu tatanan masyarakat yang sesuai dengan tuntutan politik yang ingin diterapkan.

Inti dari pendidikan politik adalah mengenai bagaimana rakyat direkrut dan disosialisasikan. Jadi, fungsi dari pendidikan politik adalah untuk menjelaskan proses perekrutan dan upaya sosialisasi kepada rakyat untuk mengerti mengenai peranannya dalam sistem politik serta agar dapat memiliki orientasi kepada sistem politik.

Fungsi yang disampaikan di atas lebih menonjolkan fungsi pendidikan politik dalam mengubah tatanan masyarakat yang ada menjadi lebih baik dan lebih mendukung tercapainya proses demokrasi. Sedangkan fungsi pendidikan politik bagi individu antara lain adalah:

Pertama, peningkatan kemampuan individual supaya setiap orang mampu berpacu dalam lalu lintas kemasyarakatan yang menjadi semakin padat penuh sesak dan terpolusi oleh dampak bermacam-macam penyakit social dan kedurjanaan.

Kedua, di samping mengenai kekuasaan, memahami mekanismenya, ikut mengendalikan dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan di tengah masyarakat.

Fungsi pendidikan politik bagi individu yang tertera di atas tidak hanya mengubah individu tapi juga membentuk individu yang baru. Dalam artian bahwa seseorang individu dengan melalui pendidikan politik tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang politik tapi juga mempunyai kesadaran dan sensitifitas dalam berpolitik yang direalisasikan dalam bentuk perbuatan yaitu dengan ikut berpartisipasi atau ditunjukkan dengan sikap dan perilaku politif yang lebih luas dalam usahanya untuk mencapai tujuan politik.

Tujuan diadakannya pendidikan politik secara formal terdapat dalam Inpres No. 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda yang menyatakan bahwa: Tujuan pendidikan politik adalah memberikan pedoman kepada generasi muda Indonesia guna meningkatkan kesadaran kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan tujuan pendidikan politik lainnya ialah menciptakan generasi muda Indonesia yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Berdasarkan pemaparan tentang tujuan pendidikan politik di atas, penulis berpendapat bahwa yang menjadi tujuan utama dari pendidikan politik adalah agar generasi muda saat ini memiliki kemampuan untuk memahami situasi sosial politik penuh konflik. Aktifitas yang dilakukan pun diarahkan pada proses demokratisasi serta berani bersikap kritis terhadap kondisi masyarakat di lingkungannya. Pendidikan politik mengajarkan mereka untuk mampu mengembangkan semua bakat dan kemampuannya aspek kognitif wawasan kritis, sikap positif, dan keterampilan politik. Kesemua itu dirancang agar mereka dapat mengaktualisasikan diri dengan jalan ikut berpartisipasi secara aktif dalam bidang politik.

Dari tujuan pendidikan politik di atas, dapat dilihat bahwa antara tujuan pendidikan politik dengan fungsi yang dimilikinya hampir sama. Tercapainya fungsi dan tujuan pendidikan politik merupakan keberhasilan dari diadakannya pendidikan politik itu sendiri.

Pendidikan politik dapat dikatakan sebagai media penyampaian konsep politik yang memiliki tujuan akhir untuk membuat warga negara menjadi lebih melek politik. Warga negara yang melek politik adalah warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban sehingga dapat ikut serta dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam setiap proses pembangunan. Pendidikan politik diperlukan keberadaannya terutama untuk mendidik generasi muda saat ini yang nantinya akan menjadi generasi penerus bangsa.

Eksistensi pendidikan politik di sini adalah sebagai tongkat estafet kepada generasi selanjutnya dalam memahami konsep-konsep politik kenegaraan. Fungsi pendidikan politik yang paling periling adalah

sebagai penyaring (*filter*) terhadap berbagai pemikiran baru, ideologi baru, dan berbagai ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

C. Budaya Politik

Budaya politik merupakan pendekatan yang cukup akhir di dalam ilmu politik. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerika Serikat, yaitu Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka yang berjudul *Budaya Politik*, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5.000 responden yang tersebar di lima negara, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko, dan Jerman Barat.

Budaya politik merupakan perwujudan nilai-nilai politik yang dianut oleh sekelompok masyarakat, bangsa, atau negara yang diyakini sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas-aktivitas politik kenegaraan.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba. Kedua ahli ini mendefinisikan budaya politik sebagai suatu sikap orientasi yang khas dari warga negara terhadap sistem politik dengan aneka ragam bagiannya dan sikap terhadap peranan warga negara yang ada dalam sistem itu (1963: 13).

Adapun Rusadi menyatakan bahwa budaya politik tidak lain adalah pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik (1988: 25).

Lebih jauh lagi Almond dan Powell menyatakan bahwa orientasi seseorang terhadap sistem politik dapat dilihat dari tiga komponen, yaitu orientasi kognitif, afektif, dan evaluative

Orientasi kognitif. Orientasi kognitif meliputi berbagai pengetahuan dan keyakinan tentang sistem politik. Contoh yang berkaitan dengan aspek pengetahuan misalnya tingkat pengetahuan seseorang mengenai jalannya sistem politik, tokoh-tokoh pemerintahan, kebijakan yang mereka ambil atau simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya secara keseluruhan seperti ibukota negara, lambang negara, kepala negara, batas negara, mata uang, dan lain-lain.

Orientasi afektif. Orientasi afektif menunjuk pada aspek perasaan atau ikatan emosional seseorang terhadap sistem politik. Seseorang mungkin memiliki perasaan khusus terhadap aspek-aspek sistem politik tertentu yang dapat membuatnya menerima atau menolak sistem politik itu secara keseluruhan. Dalam hal ini, sikap-sikap yang telah lama tumbuh dan berkembang dalam keluarga atau lingkungan hidup seseorang umumnya cenderung berpengaruh terhadap pembentukan perasaan seseorang tersebut.

Orientasi evaluatif. Orientasi evaluatif berkaitan dengan penilaian moral seseorang terhadap sistem politik. Selain itu, orientasi ini juga menunjuk pada komitmen terhadap nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja sistem politik. Dalam hal ini, norma-norma yang dianut dan

disepakati bersama menjadi dasar sikap dan penilaiannya terhadap sistem politik.

Salah satu karakteristik budaya politik yang dialami di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah patrimonialisme. Dalam budaya politik semacam ini, pola kekuasaan berjalan di atas prinsip relasi kuasa antara penguasa sebagai patron (baca: pengayom, pelindung atau penjamin kesejahteraan, keamanan dan kenyamanan) dan rakyat sebagai obyek yang dilindungi, diayomi dan dijamin kenyamanan, keamanan dan kesejahteraannya. Menurut Max Weber, patrimonialisme merupakan pola relasi kekuasaan tradisional antara seorang patron dan client, di mana “obyek ketaatan terhadap otoritas pribadi yang dia nikmati berpijak pada status tradisional.

Kelompok organisasi yang menjalankan otoritas, dalam kasus yang paling sederhana, terutama berdasar pada hubungan loyalitas individu, yang dikembangkan melalui proses pendidikan. Individu yang menjalankan otoritas bukanlah orang yang ‘hebat’, tetapi seorang ‘pemimpin’. Staf administratifnya tidak terdiri dari para pegawai, tetapi pelatih pribadi.... Apa yang menentukan hubungan staf administratif dengan pemimpin bukanlah kewajiban kantor yang bersifat impersonal, tetapi loyalitas individu kepada sang pemimpin.”

Indonesia, sebagai negara berkembang, memiliki akar sejarah patrimonialisme yang cukup kuat, yang oleh David Brown disebut sebagai “neo-patrimonialisme.” Kekuasaan neo-patrimonialisme dicirikan oleh ikatan personal antara pimpinan dan anggota organisasi atau lembaga yang dipimpin, bukan ikatan struktural-organisasional. Pola relasi dalam lembaga semacam ini lebih banyak bekerja berdasar atas kesetiaan personal para anggota organisasi, dan bukan kesetiaan terhadap lembaga itu sendiri. Akibatnya, kinerja seorang pegawai di sebuah lembaga sangat ditentukan oleh figur-figur pimpinannya, bukan atas dasar kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai staf.

Korupsi yang merajalela merupakan manifestasi utama nilai dan praktik budaya politik patrimonial yang telah berurat berakar dalam struktur kesadaran masyarakat Indonesia. Pemerintahan patrimonial, dalam definisi klasik Max Weber, tidak mengenal pemisahan birokratis antara wilayah “private” dan “official”. Penguasa patrimonial mengeksploitasi kekuasaannya seolah-olah ia adalah “hak milik pribadi”, yang tidak dibatasi oleh norma dan peraturan hukum. Kantor dan kegiatan otoritas publik melayani penguasa dan pegawainya, mereka tidak melayani tujuan-tujuan yang impersonal. Praktik patrimonialisme adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan atau, dalam bahasa sederhananya, korupsi.

Kerajaan Jawa tradisional yang ada sebelum Belanda menjajah kepulauan Indonesia yang diperintah atas dasar patrimonialisme ala

Weber. Para penguasa Jawa memperoleh kesetiaan dari para pegawainya dengan memberi mereka hak atas penghasilan dari tanah yang bisa dieksploitasi secara komersial, tetapi tidak untuk dijual atau dimiliki. Menurut Anderson, patrimonialisme muncul kembali di Indonesia karena ia adalah gaya pemerintahan tradisional pada masa pra-kolonial dan karena juga, dalam kekacauan ekonomi tahun 1950an, birokrasi rasional-legal yang diwariskan oleh Belanda terbukti tidak mampu bertahan secara ekonomi.

Pada masa pemerintahan Orde Baru, pola pemerintahan patrimonialisme mewujud dalam bentuk pemerintahan yang sentralistik dengan sejumlah sayap kelembagaan yang berfungsi sebagai “pengayom” bagi kepentingan masyarakat, namun dengan imbalan kekuasaan atau sumber daya material bagi para pemangku kekuasaan. Istilah “pamong praja” dalam sistem pemerintahan Orde Baru menggambarkan betapa pejabat diasumsikan memiliki fungsi pengayoman kepada masyarakat luas, namun fungsi tersebut tidak gratis. Di samping menyerahkan loyalitas, masyarakat yang diayomi harus memberikan sejumlah imbalan tertentu sebagai balas budi mereka atas kenyamanan hidup yang sudah dinikmati mereka. Dari sinilah praktik pungutan (liar), pemerasan, percaloan politik, dan semacamnya menemukan akarnya, karena berbagai kenyamanan dan kemudahan yang dinikmati oleh rakyat dikonstruksikan sebagai “tetesan rejeki” (trickle-down effect) dari atas, bukan karena hak yang melekat pada tiap-tiap individu.

Sistem relasi dalam kekuasaan semacam ini seringkali disebut sebagai pola relasi patron-client, di mana seorang pemimpin diperlakukan sebagai patron, pelindung atau penjamin kenyamanan hidup bagi anggota masyarakat yang dipimpinnya. Sementara itu, masyarakat menempati peran sebagai client, di mana isu-isu terkait kesejahteraan dan kemalangan sosial berada di tangan sang pemimpin atau patron. Pola relasi semacam ini pada umumnya berkembang biak di sejumlah negara yang memiliki sejarah kerajaan yang kuat, seperti Indonesia, di mana seorang raja diperlakukan sebagai pihak yang dilayani oleh rakyatnya. Raja juga menjadi pusat dari seluruh rangkaian kekuasaan yang berhak menikmati kesejahteraan akibat dari kekuasaan yang digenggamnya itu.

D. Hubungan Budaya dan Pendidikan Politik dengan Melek Politik

Pengembangan pendidikan politik masyarakat sebagai bagian pendidikan politik yang merupakan rangkaian usaha untuk meningkatkan dan memantapkan kesadaran politik dan kenegaraan, guna menunjang kelestarian Pancasila dan UUD 1945 sebagai budaya politik bangsa. Pendidikan politik juga merupakan konsep bagian dari proses perubahan kehidupan politik yang sedang dilakukan dewasa ini dalam rangka usaha

menciptakan suatu sistem politik yang benar-benar demokratis, stabil, efektif dan efisien.

Oleh karena itu, memilih bukan kesadaran sendiri, tetapi mengikuti pilihan tokohnya. Pendidikan politik ini berfungsi untuk memberikan isi dan arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Dalam filosofi pendidikan, belajar merupakan sebuah proses panjang seumur hidup artinya pendidikan politik perlu dilaksanakan secara berkesinambungan agar masyarakat dapat terus meningkatkan pemahamannya terhadap dunia politik yang selalu mengalami perkembangan.

Pembelajaran pendidikan politik yang berkesinambungan diperlukan mengingat masalah-masalah di bidang politik sangat kompleks dan dinamis. Pendidikan politik bagi generasi muda sejak dini amatlah vital dalam mendukung perbaikan sistem politik di Indonesia.

Pengetahuan sejak dini terhadap komponen-komponen kenegaraan, arti nasionalisme, hak dan kewajiban, sistem pemerintahan, pemilu, dan segala seluk-beluk politik akan melahirkan orang-orang yang berkapasitas dan memiliki arah dalam perbaikan bangsa dan negara. Ketimbang orang-orang yang beranjak dari perut lapar dan modal awal, yang ujung-ujungnya adalah makan sebanyak-banyaknya ketika menjabat.

Sisi lain juga dihadapkan pada budaya politik yang cukup kuat. Di Indonesia, dimana setiap daerah memiliki budaya dan tradisi yang mengakar kuat, memberikan andil pada kehidupan politik masyarakat. Keduanya juga berdampak pada tingkat melek politik masyarakat.

BAB III

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Populasi Penelitian

1. Diskripsi lokasi penelitian

a. Peta Geografis Kabupaten Gresik

Lokasi Kabupaten Gresik terletak di sebelah barat laut Kota Surabaya yang merupakan Ibu kota Provinsi Jawa Timur, Ibu kota Kabupaten Gresik berada 20 km sebelah utara Kota Surabaya, dengan luas wilayah 1.191,25 km².

Secara geografis wilayah Kabupaten Gresik terletak antara 112° sampai 113° Bujur Timur dan 7° sampai 8° Lintang Selatan. Kabupaten Gresik merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 2 sampai 12 meter diatas permukaan air laut kecuali Kecamatan Panceng dan sebagian kecamatan ujung pangkah yang mempunyai ketinggian 25 meter di atas permukaan air laut.

Berdasarkan ciri-ciri fisik tanahnya, wilayah kabupaten Gresik dibagi menjadi empat bagian yaitu: *pertama* bagian utara, merupakan bagian dari daerah pegunungan kapur utara yang memiliki tanah relatif kurang subur

namun menyimpan potensi bahan-bahan galian terutama bahan galian golongan C. *Kedua* bagian tengah, merupakan kawasan dengan tanah yang relatif subur bagi pertanian dan pertambakan. *Ketiga* bagian selatan, terdiri dari dataran rendah yang cukup subur dan sebagian merupakan daerah perbukitan dengan potensi bahan-bahan galian golongan C. *Keempat* wilayah kepulauan bawean dan pulau kecil sekitarnya juga menyimpan potensi bahan galian jenis onix.

Selain daratan, luas wilayah perairan kabupaten Gresik adalah 5.773,80 km² yang sangat potensial dari sub sektor perikanan. Sebagian wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, dimana panjang pesisir pantai kabupaten gresik adalah 140 km² yang memanjang mulai dari Kecamatan Kebomas, Gresik, Manyar, Bungah, Sidayu, Ujungpangkah dan Panceng serta Kecamatan Sangkapura dan Tambak yang lokasinya berada di Pulau Bawean yang berada 150 km lepas pantai Laut Jawa. Sebagai wilayah pesisir tersebut sudah memiliki pelabuhan yang menjadi akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional.

Secara administrasi kabupaten Gresik terbagi atas 18 Kecamatan dan terdiri dari 330 Desa dan 26 Kelurahan. Adapun batas wilayah kabupaten gresik adalah sebagai berikut:

Utara : Laut Jawa
Selatan : [Kota Surabaya](#), [Kabupaten Sidoarjo](#), [Kabupaten Mojokerto](#)
Barat : [Kabupaten Lamongan](#)
Timur : [Selat Madura dan Kota Surabaya](#) ⁸

Kabupaten Gresik adalah salah satu dari wilayah penyanggah kota Surabaya. Dimana Kota Surabaya adalah ibu kota sekaligus pusat ekonomi Jawa Timur dan kawasan Indonesia Timur. Disamping Kabupaten Gresik daerah lain yang juga dapat dikatakan sebagai kawasan penyanggah Kota Surabaya adalah Kabupaten Sidoarjo, Bangkalan, Mojokerto dan Lamongan. Keenam wilayah ini dikenal dengan istilah kawasan Gerbangkertosusila. Fungsi wilayah penyanggah bagi Kabupaten Gresik dapat bernilai positif secara ekonomis, jika Kabupaten Gresik dapat mengantisipasi dengan baik kejenuhan perkembangan kegiatan industri Kota Surabaya. Yaitu dengan menyediakan lahan alternatif pembangunan kawasan industri yang representatif, kondusif, dan strategis.

Hampir sepertiga bagian dari wilayah Kabupaten Gresik merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 140 Km meliputi Kecamatan Kebomas, sebagian Kecamatan Gresik, Kecamatan Bungah dan Kecamatan Ujungpangkah, Sidayu dan Panceng, serta Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sangkapura yang berada di Pulau Bawean. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan besar, maka Kabupaten Gresik memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Gresik sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.

⁸ . Mariyadi, *Statistik daerah kabupaten gresik 2013* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2013), 1

b. Peta Demografi Kabupaten Gresik

Tahun 2010. Berdasarkan hasil registrasi dari Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Sosial Kabupaten Gresik jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada akhir tahun 2009 sudah mencapai 1.223.512 jiwa yang terdiri dari 615.763 laki-laki dan 607.749 perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 315.437 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 Km² maka tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Gresik pada tahun 2009 mencapai 1,019 jiwa/km². Artinya tiap km² di wilayah kabupaten Gresik pada tahun 2009 rata-rata telah ditempati penduduk sekitar 1.019 jiwa dan mengalami kenaikan sebesar 0,83 persen dibanding tahun sebelumnya. Secara total pada tahun 2009 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2009 kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 102 persen. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 102 jiwa penduduk laki-laki.⁹

Tahun 2011. Dari hasil registrasi penduduk dinas kependudukan, catatan sipil dan sosial menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Gresik pada tahun 2010 sebesar 1.237.675 jiwa, yang terdiri dari 623.141 jiwa penduduk laki-laki dan 614.534 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 323.863 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.039 jiwa/km². Secara total pada tahun 2010 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2010 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.¹⁰

Tahun 2012. Dari hasil registrasi penduduk dinas kependudukan, catatan sipil dan sosial menunjukkan bahwa jumlah penduduk kabupaten Gresik pada tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, yang terdiri dari 639.897 jiwa penduduk laki-laki dan 630.454 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 270.264 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan penduduk sebesar 1.066 jiwa/km².

Secara total pada Tahun 2011 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2011 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.¹¹

Tahun 2013. Dari hasil registrasi penduduk menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Gresik pada Tahun 2012 sebesar 1.307.995 jiwa, yang terdiri dari 658.786 jiwa penduduk laki-laki dan 649.209 jiwa penduduk perempuan. Jumlah penduduk tersebut berada pada 356.685 keluarga. Dengan luas wilayah 1.191,25 km² Kabupaten Gresik mempunyai kepadatan

⁹ . Katalog BPS kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2010* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2010), 33

¹⁰ . Katalog BPS kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2011* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2011), 31

¹¹ . Katalog BPS kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2012* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2012), 35

penduduk sebesar 1.098 jiwa/km². Secara total pada Tahun 2012 penduduk laki-laki jumlahnya lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. Hal ini dapat dilihat dari angka rasio jenis kelamin pada tahun 2012 Kabupaten Gresik mempunyai angka rasio jenis kelamin sebesar 101. Ini berarti dari 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki.¹²

Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 sebesar 1.270.351 jiwa, maka terjadi kenaikan jumlah penduduk sebesar 37.644 jiwa atau 2,9%. Dengan luas wilayah Kabupaten Gresik sebesar 1.191,25/km² maka tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Gresik adalah 1.098 jiwa/km². Artinya tiap km² di wilayah kabupaten Gresik rata-rata telah ditempati penduduk sekitar 1.098 jiwa.

Melihat angka sex rasio yang berada di atas angka 100 maka dapat diindikasikan bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan. Namun demikian melihat angka perbandingan tersebut lebih sedikit dari angka 100 berarti perbedaan antara penduduk perempuan dan penduduk laki-laki sudah hampir seimbang.¹³

Dari gambaran pertumbuhan penduduk kabupaten Gresik di atas dapat dilihat dalam tabel Peta Demografis Kabupaten Gresik tahun 2010-2013

Tahun	Jml penduduk		Jumlah	Kepadatan penduduk jiwa/km ²
	Laki-laki	Perempuan		
2010	615.763	607.749	1.223.512	1,019
2011	623.141	614.534	1.237.675	1.039
2012	639.897	630.454	1.270.351	1.066
2013	658.786	649.209	1.307.995	1.098

2. Partisipasi dalam Pemilu

Partisipasi masyarakat Gresik dalam setiap Pemilu berada pada posisi sama dengan angka partisipasi nasional. Ada beberapa perbedaan pada masing-masing Pileg, Pilpres, Pilgub dan Pilkada Bupati/Wakil Bupati, namun secara umum menggambarkan tingkat partisipasi yang konstan di masing-masing Pemilu.

Secara umum dapat digambarkan dua katagori angka partisipasi, yakni Pemilu sebelum 2008 atau awal reformasi dan Pemilu setelah 2008. Pada pemilu sebelum 2008 angka partisipasi berada di kisaran 80 %, sementara setelah tahun 2008 angka partisipasi di bawah kisaran 75 % ke bawah.

Angka partisipasi dalam Pemilu terakhir di Kabupaten Gresik dapat digambarkan berikut ini. Pemilu Presiden tahun 2009 tingkat partisipasi

¹² . Katalog BPS Kabupaten Gresik, *Gresik Dalam Angka 2013* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2013), 35

¹³ . Mariyadi, *Statistik daerah kabupaten Gresik 2013* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2013), 4

masyarakat 70, 4 %, sementara dalam Pemilu 2014 yang lalu naik menjadi 74,3 %. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan angka partisipasi pada Pemilu Legislatif.¹⁴

Tabel 1

Angka Partisipasi Pemilu Presiden

NO	TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT KEHADIRAN		PROSENT ASE PARMAS
			Suara sah	SuaraTidak Sah	
1	2009	876.502	573.445	43.654	70,4%
2	2014	906.433	663.451	7.546	74,3%

Sementara dalam Pilkada baik Pemilu Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati tidak jauh berbeda, bahkan lebih rendah dibandingkan dengan Pilpres dan Pileg. Misalnya, pada Pilgub 2008, pada Putaran Satu angka partisipasi mencapai 67, 71 %, sementara pada Putaran Kedua turun menjadi 55, 13 %. Dalam Pilkada Bupati/Wakil Bupati 2010 mengalami kenaikan. Pada Putaran I angka partisipasi mencapai 70, 01 % sementara pada putaran II mencapai 71, 68 %.¹⁵

Tabel 2

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PILKADA GRESIK

NO	TAHUN	JUMLAH PEMILIH (DPT)	TINGKAT KEHADIRAN		JUMLAH PASLON		PROSENTASE PARMAS
			Suarasah	SuaraTidakSah	PARPOL	PERSEORANGAN	
1	2010 (Sebelum MK)	868.804	591.398	16.828	6	-	70,01%
2	Setelah MK 2010	868.803	610.192	12.584	6	-	71,68%

3. Partisipasi pemilih pemula

Berdasarkan statistik KPUD Gresik, jumlah pemilih tetap (DPT) dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Jika dihitung menggunakan interval lima

¹⁴ Data diambil dari berbagai sumber terutama website KPUD Gresik. (Data diambil 27 Juli 2015)

¹⁵ Ibid.

tahunan, kenaikan angka angka pemilih berkisar antara 4 hingga 5 % dari total jumlah DPT dan jumlah penduduk.

Dalam lima tahun terakhir terdapat kenaikan 47.620 pemilih. Belum termasuk DPT terakhir yang dikeluarkan oleh KPUD Gresik tahun 2015 yang akan digunakan untuk keperluan Pilkada pada 9 Desember 2015. Diperkirakan masih akan ada tambahan 8 hingga 9 ribu pemilih lagi hingga sampai pemutaakhiran data selesai pada Oktober mendatang. Sehingga kalau ditotal dalam lima tahun terakhir kenaikan DPT mencapai 54 ribu, atau 4,5 % dari total pemilih.

Secara garis besar jumlah DPT pada Pilkada 2010 mencapai 868.804. Pada Pilgub 2013, angka tersebut bertambah menjadi 894.804 DPT atau ada tambahan 26.400. Pada Pileg 2014 DPT bertambah menjadi 901.671 atau ada tambahan 6867 DPT. Pada Pilpres 2014 bertambah lagi menjadi 906.433, atau ada kenaikan 4.762 DPT. Diperkirakan pada Pilkada Desember 2015 DPT pada kisaran 915.000 atau bahkan lebih.

DPT Pemilu dan Pertumbuhannya

NO	PEMILU	TAHUN					TAMBAHAN DPT
		2010	2013	2014	2014	2015	
1	Pilkada	868.804					
2	Pilgub		894.804				26.400
3	Pileg			901.671			6.867
4	Pilpres				906.433		4.762
5	Pilkada					?	

Bagaimana dengan partisipasi pemilih pemula? Belum ada penelitian yang secara khusus tentang hal tersebut. Namun jika melihat fakta dan pengalaman sebelumnya, diperkirakan angka Golput dari pemilih pemula cukup tinggi. Satu sisi informasi yang terkait dengan Pemilu yang masuk ke mereka dianggap masih kurang, sisi lain sikap skeptis dan acuh tak acuh yang menjadi ciri dan karakteristik pemilih pemula merupakan salah satu pemicunya.

B. Deskripsi Sampel Penelitian

Penelitian ini menggunakan 350 sampel yang menyebar di 12 kecamatan di Kabupaten Gresik. Pemilihan kecamatan didasarkan pada karakteristik sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Pemkab dalam memetakan geografi dan karakteristik daerah, yakni meliputi Gresik Selatan, Gresik Tengah dan Gresik

Utara. Penelitian ini tidak mewakili Pulau Bawean karena pertimbangan situasi dan kondisi.

Yang dijadikan sampel wilayah selatan meliputi Wringinanom, Benjeng, Kedamean dan Driyorejo. Wilayah Tengah meliputi Gresik Kota, Kebomas, Duduk SPY dan Manyar. Wilayah utara meliputi Bungah, Dukun, Panceng dan Sidayu.

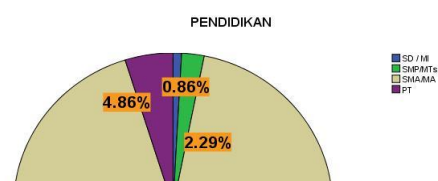
Data diambil pada awal akhir Juni hingga pertengahan Juli 2015, yakni pada saat mulai pendaftaran calon independen dan berakhir pada saat menjelang pendaftaran pasangan calon dari unsur Parpol. Meskipun pengambilan data diambil sebelum penetapan Bakal Calon menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati, bukan berarti masyarakat tidak mengerti dan tidak mengetahui tentang Pilkada Gresik begitu pula para kandidat yang akan berkompetisi. Di awal-awal tahun 2015, mulai bulan Maret 2015 sudah bermunculan spanduk dalam skala luas tentang beberapa kandidat yang akan berkompetisi. Spanduk tersebut menyebar di seluruh kecamatan, terutama di jalan raya. Misalnya spanduk Jazilul Fawaid, bakal calon yang akan diusung dari PKB. Demikian pula Husnul Khuluq-Bambang Suhartono dengan latar spanduk NU dan PDIP. Di surat kabar dan media online tidak kalah gencarnya. Beberapa kandidat sudah memperkenalkan dalam acara publik yang dikemas dengan berbagai model. Sementara itu, pasangan incumbent Sambari-Qosim sudah terang-terangan menyampaikan keinginannya untuk kembali maju sebagai kandidat. Meskipun tidak ada spanduk dan baliho yang menyatakan untuk kembali maju, namun media cetak, elektronik dan on line sudah sangat gencar memberitakan tentang keinginan keduanya.

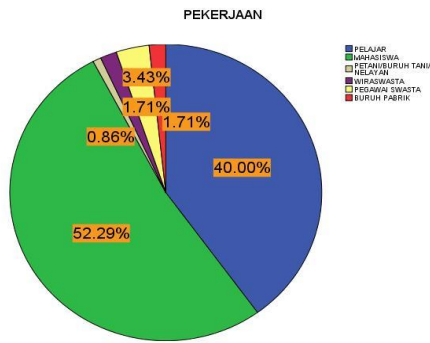
Dengan demikian, meskipun data diambil sebelum penetapan calon pada akhir Agustus, namun publikasi luas dan terbatas sudah bermunculan. Dalam arti bahwa masyarakat dianggap sudah melihat publikasi dan mengetahui tentang pelaksanaan Pilkada dan beberapa kandidat yang akan berkompetisi.

Sementara itu, gambaran sampel secara umum; 95 % sampel penelitian belum pernah mengikuti Pemilu, dan hanya 5 % yang sudah merasakan Pemilu, yakni pada saat Pilpres 2014 lalu. Meskipun sudah memiliki hak pilih dan mendapat panggilan untuk mencoblos, namun sebagian besar mereka memilih untuk abstain alias Golput pada saat Pileg dan Pilpres 2014. Penelitian ini tidak menggambarkan tentang alasan mereka tidak menggunakan hak pilih, namun demikian secara umum menggambarkan bahwa responden tidak peduli dengan Pemilu. Komposisi sampel 51, 43 % laki-laki, dan 48, 57 % perempuan. Dari status keluarga, 98, 29 % masih single dan sisanya, 1, 5 % sudah menikah.

Meskipun 92 % baru lulus atau sedang menempuh pendidikan SMA sederajat, sebagian kecil di antara mereka sudah bekerja. Selebihnya 40 % masih pelajar, dan 52 % masih berstatus sebagai mahasiswa.

Berikut ini adalah grafik sampel berdasarkan pekerjaan dan pendidikan :





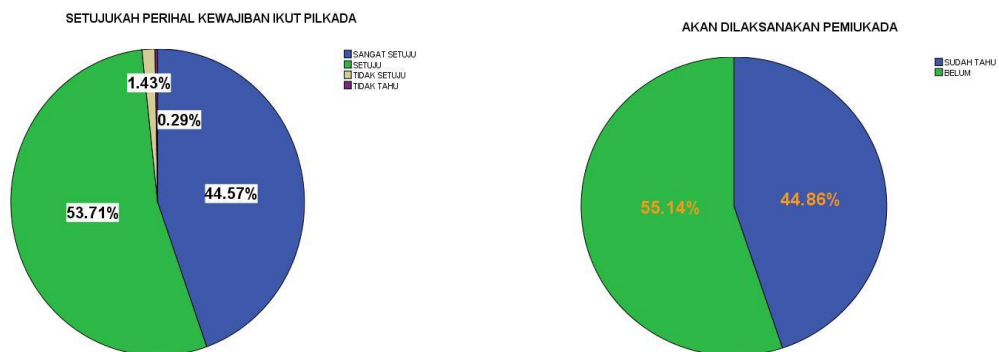
C. Tingkat Melek Politik Pemilih Pemula

1. Pengetahuan tentang Pilkada

Pemilu merupakan kewajiban bagi tiap warga Negara, karena akan menentukan nasib bangsa melalui proses pergantian kepemimpinan. Demikian pandangan pemilih pemula Gresik. 44, 57 % menyatakan sangat setuju dengan pandangan dimaksud, 53, 73 % menyatakan setuju. Sementara hanya 1,5 5 yang menyatakan tidak setuju.

Namun demikian, hanya sebagian kecil yang mengetahui bahwa pada tahun ini, tepatnya 9 Desember 2015 akan dilaksanakan Pemilukada, dan sebagian besar tidak mengetahuinya. Komposisi yang tahu perhelatan Pilkada 44, 89 %, sementara yang belum tahu 55, 14 %.

Berikut ini grafik pandangan pemilih pemula dan informasi tentang Pilkada :



Dari tiga wilayah di Kabupaten Gresik, tidak ada perbedaan yang menonjol soal pengetahuan akan dilaksanakannya Pilkada pada tahun ini. Artinya pandangan tersebut merata di semua kawasan. Hal serupa juga terkait dengan penting dan tidaknya Pilkada bagi pemilih pemula. Hasilnya,

40, 29 % menyatakan sangat penting, 57,14 % menyatakan penting, dan hanya 1 % yang menyatakan tidak penting.

2. Pengetahuan tentang bakal Calon Bupati/ Wakil Bupati

Meskipun belum ada penetapan resmi dari KPU tentang Calon Bupati/Wakil Bupati, hal tersebut juga ditanyakan kepada pemilih pemula. Karena pada kenyataannya, bakal Calon Bupati/Wakil Bupati sudah beredar dan diketahui luas oleh masyarakat. Berbagai spanduk, benner dan gambar kecil begitu meluas di masyarakat, baik di kota maupun di desa. Demikian pula pemberitaan di media massa, terutama media lokal yang setiap hari menyajikan berita tentang hiruk pikuk dukungan dan sosialisasi kepada publik.

Pengetahuan tentang Bakal Calon. Meskipun banyak gambar, pamflet, spanduk dan pemberitaan, pemilih pemula Gresik masih belum tahu bakal calon Bupati/Wakil Bupati yang akan datang. 18 % menyatakan sudah mengetahui calon, dan 82 % belum mengetahuinya. Justru yang menjadi menarik, tingkat pengetahuan kaum perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

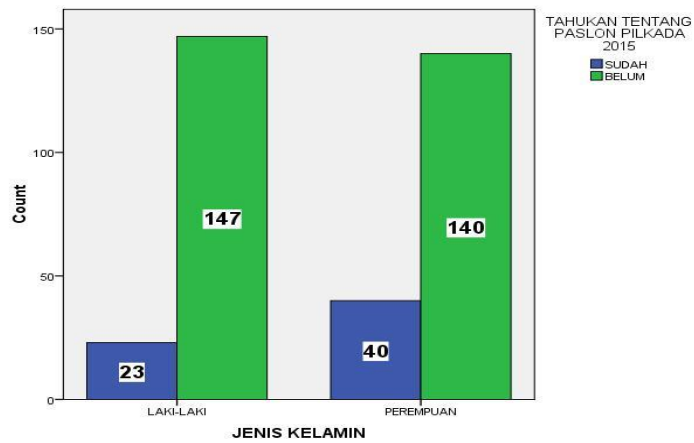
Berikut ini adalah pengetahuan tentang bakal Calon Bupati/Wakil Bupati :



Grafik di atas menunjukkan bahwa hanya 18 % yang mengetahui bakal calon, dan 82 % yang belum mengetahuinya. Dari 82 % tersebut, yang paling besar justru dari kalangan perempuan. 80 % yang belum mengetahui adalah dari kalangan perempuan, sementara jumlah dari laki-laki lebih kecil. Bila dikomparasikan dengan jumlah responden, dimana antara laki-laki dan perempuan cukup seimbang bahkan lebih tinggi responden perempuan, hal ini menunjukkan bahwa kaum laki-laki lebih responsif dan peduli terhadap isu-isu politik, sementara perempuan berada pada posisi sebaliknya.

Dilihat dari sisi kedaerahan, ketidaktahuan perempuan wilayah selatan lebih tinggi dibandingkan dengan tengah dan utara. Margin masing-masing wilayah 7,5 hingga 12 %. Gambaran data di atas menunjukkan bahwa terjadi disparitas pengetahuan antara laki-laki dan perempuan dilihat dari sisi geografis.

Berikut ini adalah gambaran pengetahuan pemilih pemula dilihat dari aspek gender :

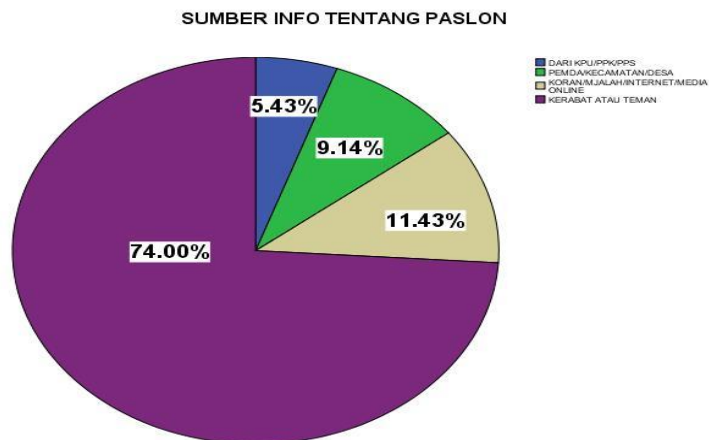


Sumber informasi tentang Bakal Calon

74 % sumber informasi berasal dari kerabat atau teman, 11,45 % berasal dari majalah/Koran/media online dan publikasi spanduk, 9,14 % berasal dari Pemkab/Kecamatan/Desa, dan hanya 5,43 % yang memperoleh informasi dari KPUD/PPK/PPS. Data tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Bakal Calon sebagian besar diperoleh dari jalur informal, dari mulut ke mulut, dari diskusi antar teman, atau dari obrolan di warung, kafe dan tempat-tempat santai. Data tersebut juga menunjukkan sumber informasi dari jalur formal tidak banyak mempengaruhi pengetahuan pemilih pemula.

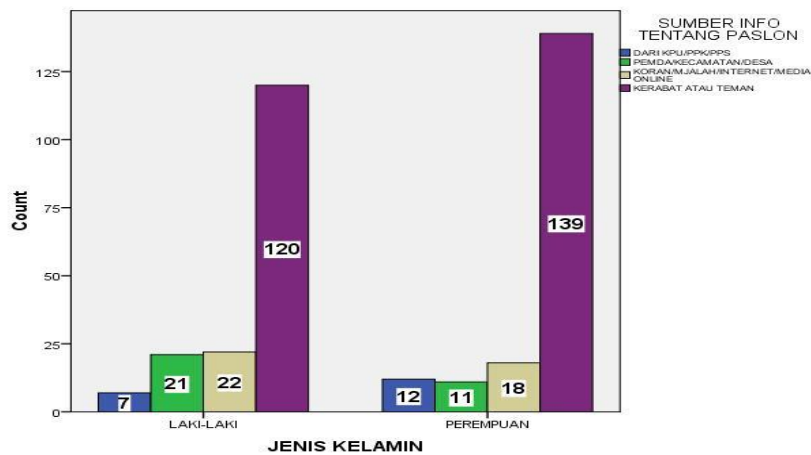
Sumber informasi tentang pemilih

Berikut ini adalah grafik sumber informasi tentang bakal calon yang diperoleh oleh pemilih pemula Gresik :



Dilihat dari sisi gender, pengetahuan pemilih pemula yang bersumber dari kerabat dan teman menunjukkan adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. Sementara yang berasal dari sumber informasi lain, terutama dari informasi jalur formal dan media, laki-laki lebih tinggi, meskipun jumlahnya tidak terlalu signifikan. Namun hal tersebut sudah dapat menggambarkan bahwa laki-laki lebih responsif dan peduli pada isu-isu politik dibandingkan dengan perempuan, terutama dalam hal penggunaan media dan sumber lain untuk mengetahui tentang perkembangan politik lokal.

Berikut adalah grafik sumber informasi tentang Bakal Calon :



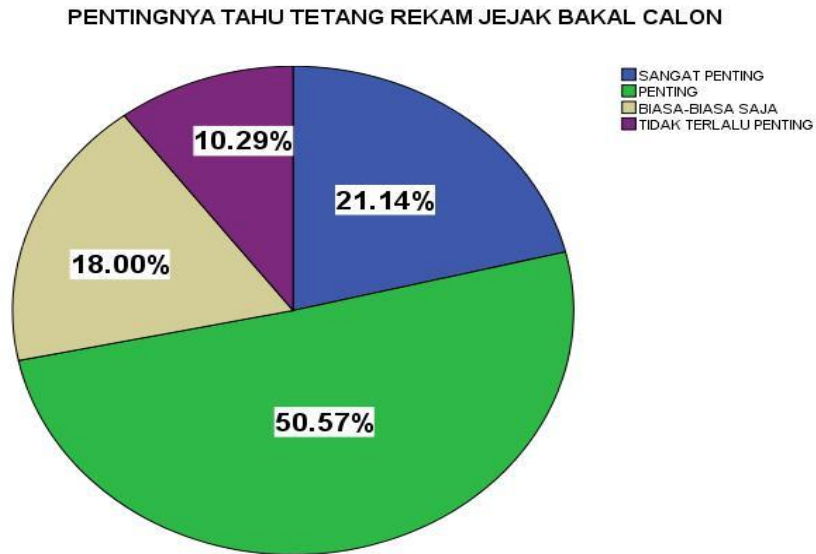
Sementara dari sisi geografis tidak ada perbedaan signifikan antar kawasan di Kabupaten Gresik. Margin antara wilayah Selatan, Tengah dan Utara berkisar 2 hingga 3,5 %. Artinya mereka memiliki kecenderungan sama dalam mengakses informasi tentang pasangan Bakal Calon dalam Pilkada.

Pentingnya mengetahui tentang rekam jejak. Rekam jejak merupakan hal yang sangat penting untuk mengukur tingkat kualitas calon. Pemilih punya kecenderungan bahwa rekam jejak menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan pilihan, terutama bagi kalangan pemilih pemula yang terdiri dari kalangan pelajar dan mahasiswa atau pemilih kritis.

Dari hasil survey ini dapat diuraikan bahwa 21, 14 % menganggap sangat penting dan menjadi menjadi prioritas untuk mengetahui rekam jejak, 50. 57 % menganggap penting tetapi tidak dijadikan prioritas utama. Selebihnya 18 % menganggap biasa-biasa saja, artinya tidak banyak mempengaruhi

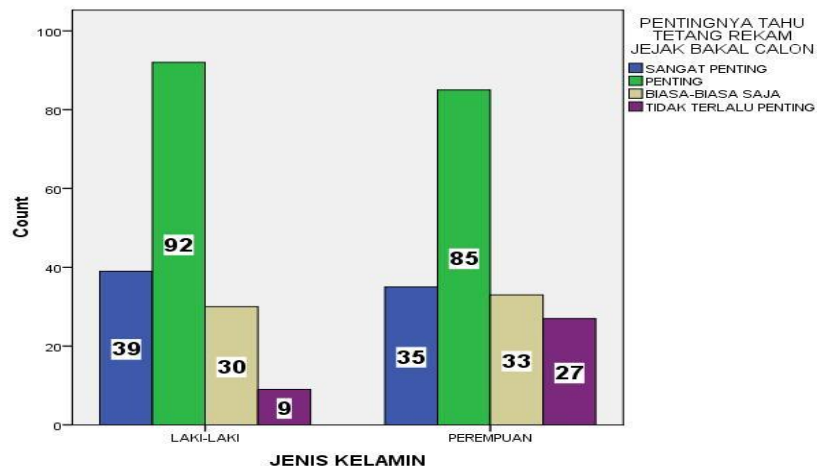
keterpilihan seseorang, dan hanya 10, 29 % yang menyatakan tidak penting, atau sama sekali tidak mempengaruhi keterpilihan.

Grafik berikut ini adalah gambaran penting tidaknya mengetahui tentang rekam jejak Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Gresik :



Dilihat dengan perspektif gender, yang menyatakan sangat penting dan penting mengetahui rekam jejak Bakal Calon dari kalangan laki-laki. Sementara perempuan pada posisi sebaliknya. Demikian pula yang menyatakan biasa-biasa saja dan menganggap tidak penting berasal dari pemilih pemula berlatar belakang perempuan.

Berikut ini adalah grafik penting tidak mengetahui bakal calon dari sisi gender :



Dasar dan pertimbangan utama dalam memilih dan menentukan pilihan. Pertanyaan ini bermaksud untuk mengukur alasan (*reasoning*) pemilih pemula dalam memilih dan menentukan pilihan dalam Pilkada 2015. Pilihan didasarkan pada pertimbangan utama atau yang menjadi alasan paling kuat datang ke TPS dan menentukan pilihannya. Hasil survey menggambarkan bahwa 62.57 % memilih dan menentukan pilihan karena faktor rekam jejak dan kapabilitas calon, 14, 57 % memilih atas dasar kesamaan keyakinan dan budaya. Memilih atas dasar sama-sama seagama, segolongan, dari daerah, kecamatan sama, karena kesamaan latar belakang pendidikan. 7,43 % memilih atas dasar kesamaan pandangan politik. Yang dimaksud adalah kesamaan partai politik dan kesamaan pandangan politik kenegaraan. Yang memilih atas dasar pertimbangan janji atau iming-iming saat kampanye hanya 10 %. Hanya 5,43 % dari pemilih pemula yang memilih atas dasar pemberian hadiah (money politic).

Berikut ini adalah grafik tentang dasar dan dasar dalam memilih dan menentukan pilihan pemilih pemula dalam Pilkada :

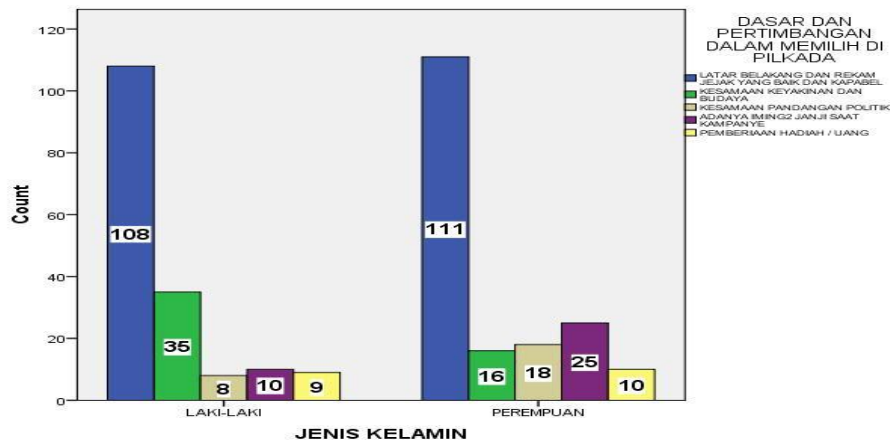


Data di atas menunjukkan bahwa pemilih pemula memiliki pandangan yang rasional dalam menentukan pilihan. Alasan kapabilitas, rekam jejak dan kemampuan seseorang menjadi pertimbangan dalam memilih dan menentukan pilihan. Sementara pertimbangan di luar hal tersebut menjadi persoalan kedua. Demikian pula janji-janji saat kampanye tidak banyak mempengaruhi pilihan pemilih pemula. Hal yang sama dengan pemberian hadiah atau uang juga tidak memiliki dampak yang signifikan.

Sementara dilihat dari latar belakang gender, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan tentang alasan-alasan rasionalitasnya dalam menentukan pilihan. Yang berbeda pada keterpengaruhan kesamaan pandangan politik dan janji-janji saat kampanye, dimana terjadi diparitas antara keduanya meskipun tidak terlalu tajam. Aspek kesamaan pandangan politik dan janji-janji lebih tinggi perempuan dibandingkan laki-laki. Artinya,

tingkat keterpengaruhan janji saat kampanye lebih memperoleh respon dari kalangan perempuan dibandingkan dengan laki-laki.

Berikut ini adalah grafik dasar dan pertimbangan dalam menentukan pilihan :



Sementara itu dilihat dari sisi geografis, ada perbedaan yang cukup menonjol antara kawasan Selatan, Tengah dan Utara. Semua wilayah tetap mempertimbangan aspek kapasitas dan rekam jejak sebagai dasar utama dalam menentukan pilihan. Namun pada aspek lain, terutama janji saat kampanye dan pemberian hadiah mengalami perbedaan. Pada aspek ini wilayah selatan jauh lebih menonjol dibandingkan dengan kawasan utara dan tengah. Dimana terutama janji saat kampanye dan pemberian hadiah ikut menentukan terhadap kehadiran di TPS dan menentukan pilihan dalam Pilkada.

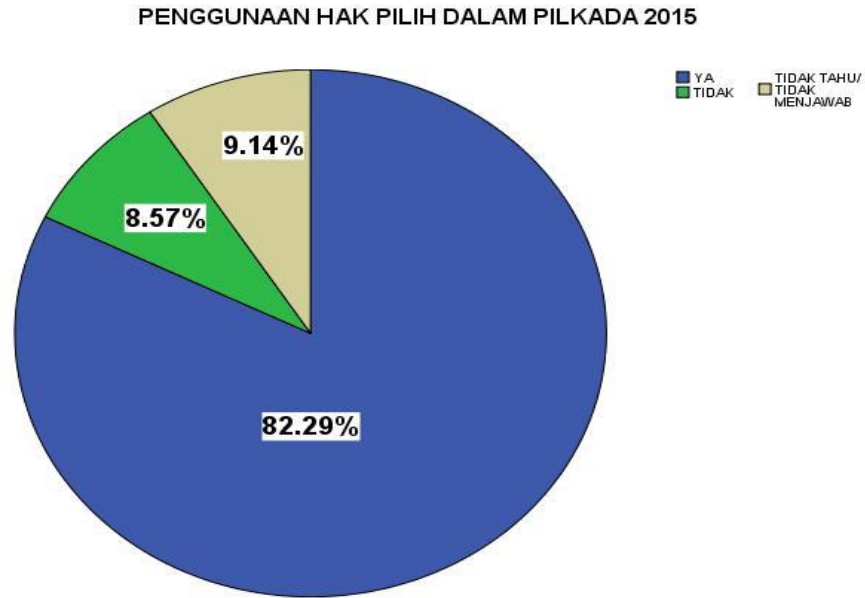
Sementara pada bagian lain, yang cukup menonjol pula antara kawasan selatan dengan tengah dan utara dasar dan pertimbangan memilih karena kesamaan pandangan agama dan budaya. Dalam konteks ini kesamaan faktor ideologi keagamaan, budaya keagamaan dan paraktik keagamaan lebih menonjol di kawasan utara dan tengah dibandingkan dengan kawasan selatan.

3. Pengetahuan Tentang Mencoblos

Penggunaan hak pilih dalam Pilkada 2015. Pertanyaan ini diajukan kepada pemilih pemula apakah mereka akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Gresik pada tahun 2015 ini. 82,29 % menyatakan akan menggunakan hak pilihnya, 8. 59 % menyatakan tidak akan menggunakan hak pilih alias tidak akan ke TPS dan 9,14 % yang menyatakan tidak tahu atau belum punya keputusan.

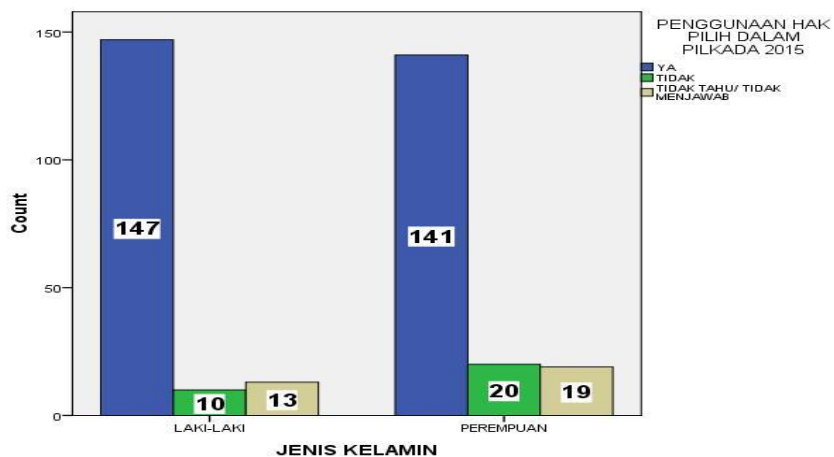
Melihat data tersebut peluang Golput cukup kecil, yakni kisaran 18 %. Sementara peluang partisipasi justru sebaliknya.

Berikut ini adalah grafik penggunaan hak pilih dalam Pilkada 2015 :



Sementara dilihat dari aspek gender, keikutsertaan laki-laki dan perempuan dalam Pilkada 2015 tidak mengalami perbedaan. Yang berbeda justru pada pertanyaan tentang ketidakikutsertaan dan belum punya keputusan. Pada aspek ini perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki yang belum memiliki keputusan dan tidak akan ikut Pilkada. Data tersebut memiliki korelasi dengan data sebelumnya yang menyatakan bahwa perempuan cenderung lebih pasif dibandingkan laki-laki, terutama dalam mengakses informasi tentang politik dan informasi Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati Gresik.

Berikut ini adalah grafik penggunaan hak pilih dalam Pilkada 2015 :

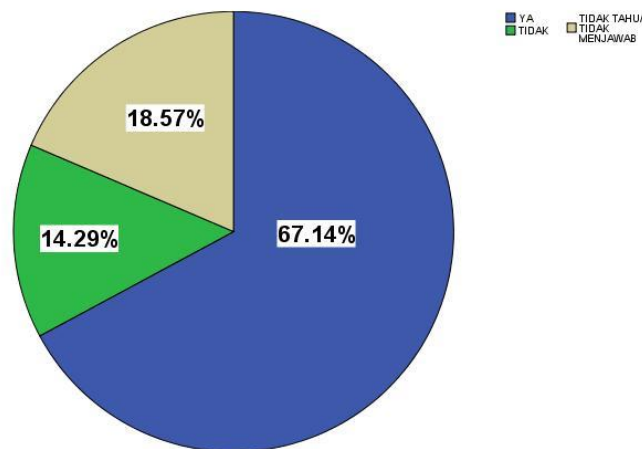


Dari sisi geografis, dilihat dari aspek penggunaan hak pilih, pemilih pemula yang berada di kawasan utara jauh lebih rendah dibandingkan dengan kawasan tengah dan selatan. Artinya, pemilih pemula yang berada di kawasan utara potensi Golput ataupun skeptis lebih tinggi dibandingkan dengan dua kawasan yang lain. Angka margin kawasan utara dengan dua kawasan lain cukup tinggi, yakni berkisar antara 17 hingga 19 %, suatu angka yang berpotensi meningkatkan Golput di Kabupaten Gresik.

Mengajak orang lain untuk mencoblos. Pertanyaan ini diajukan untuk mengetahui tingkat sensitifitas dan kepedulian pemilih pemula terhadap Pilkada. 67, 14 % menyatakan akan mengajak orang lain (terutama teman) untuk mencoblos. Sementara yang tidak akan mengajak dan tidak tahu/tidak menjawab 33 %, berada jauh di bawahnya. Hal ini membuktikan bahwa pemilih pemula masih memiliki kepedulian terhadap Pilkada dan masa depan politik Gresik melalui keikutsertaan dalam PemiluKada.

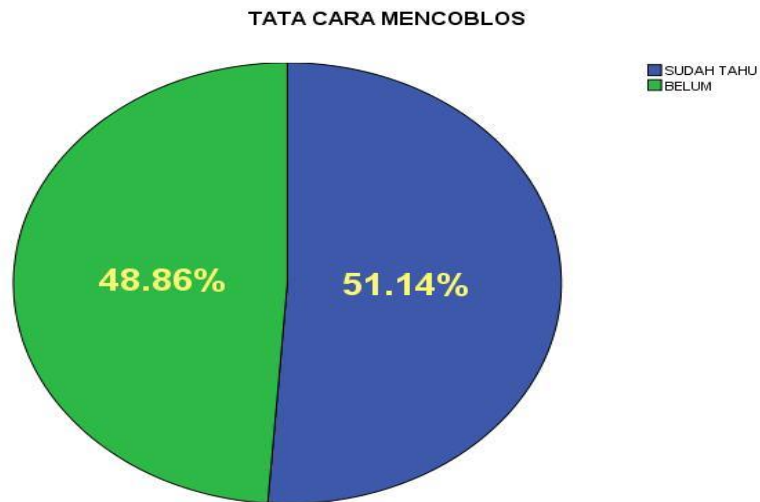
Berikut ini adalah grafik gambaran dalam mengajak orang lain untuk mencoblos :

APAKAH AKAN MENGAJAK ORANG LAIN BERPARTISIPASI DALAM PILKADA



Pengetahuan tata cara mencoblos. Pertanyaan ini ditujukan untuk mengetahui tentang tata cara mencoblos, yang meliputi cara masuk ruangan bilik suara, cara mencoblos yang benar dan memasukkannya ke dalam kotak suara. Hasil penelitian terhadap pemilih pemula menunjukkan bahwa antara jumlah yang *tahu* dengan *tidak tahu* tidak jauh berbeda. Yang sudah tahu tata cara mencoblos mencapai 51,14 %, sementara yang tidak tahu 48.86 %.

Pengetahuan tentang tata cara mencoblos :



Ketidaktahuan tata cara mencoblos merata di semua wilayah, demikian pula terjadi pada pemilih laki-laki dan perempuan. Artinya, pengetahuan tentang tata cara mencoblos di bilik suara dianggap sebagai sesuatu yang baru dan belum pernah berpengalaman sebelumnya. Sementara bagi mereka yang menyatakan sudah tahu tata caranya, dianggap kegiatan mencoblos pada saat Pemilu sama dengan pemilihan OSIS, BEM, Karang Taruna atau kegiatan lain yang serupa.

Pada aspek ini, rupanya menjadi tanggung jawab penyelenggara Pemilu untuk melakukan sosialisasi dan simulasi pemungutan. Sosialisasi dan simulasi dengan melibatkan pemilih pemula sebanyak-banyaknya, melalui berbagai kegiatan yang menarik bagi mereka.

D. Pembahasan dan Implikasi Teorik

Dalam teori Pemilu, angka partisipasi diukur dari sejauh mana masyarakat memahami tentang makna dan arti penting Pemilu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu merupakan instrumen legal untuk menyusun kebijakan melalui suksesi dan representasi masyarakat lewat wakil-wakilnya, terutama di DPR/MPR. Melalui Pemilu hak-hak politik rakyat dapat tersalurkan secara legal dan formal.

Dalam alam demokrasi, keberadaan Pemilu merupakan suatu yang bersifat mutlak. Tidak ada instrumen lain yang dapat mewakili keterwakilan hak-hak politik rakyat selain melalui Pemilu. Penjaminan atas hak-hak politik itu merupakan sesuatu yang terintegral dalam alam demokrasi yang bersifat legal. Apapun namanya sebuah institusi negara, begitu pula apapun bentuknya konstitusi tersebut, Pemilu merupakan satu-satunya cara yang sah.

Untuk mewujudkan Pemilu yang berkualitas, salah satu indikatornya ditandai dengan angka partisipasi yang tinggi masyarakat untuk menentukan hak politiknya. Namun bukan berarti, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat, maka semakin berkualitas demokrasi suatu negara. Begitu pula sebaliknya, jika angka partisipasi rendah, tidak serta merta dikatakan demokrasinya tidak berkualitas. Karena tidak ada dalam teori-teori Pemilu yang menyatakan sedemikian itu. Bahwa wujud representasi ditandai dengan partisipasi, merupakan sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Karena semakin tinggi angka partisipasi, maka hak-hak politik masyarakat dengan sendirinya terwadahi dengan baik.

Untuk mewujudkan angka partisipasi yang tinggi, maka tidak cukup dengan hanya penyadaran maupun tekanan (*pressing group*) untuk memobilisasi massa agar datang ke tempat-tempat pemilihan pada saat Pemilu. Datang ke arena pencoblosan merupakan hak bagi tiap warga negara, begitu pula tidak menghadiri alian Golput juga hak setiap orang. Karena tidak ada satu pun yang bisa memaksa atau terpaksa dalam menentukan hak pilihnya pada saat Pemilu. Demikian pula, menjadi hak warga negara untuk menentukan siapa dan partai apa yang akan dipilih.

Karena tidak adanya paksaan itulah, maka pemahaman terhadap arti pentingnya Pemilu merupakan suatu keniscayaan. Di Indonesia, pemahaman terhadap arti pentingnya Pemilu sudah ditanamkan sejak dini, melalui pendidikan yang terstruktur dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Namun demikian tidak semua proses pemahaman itu menghasilkan produk yang diinginkan. Jika produk yang diukur hanyalah angka partisipasi, tentu saja proses pendidikan politik tersebut dikatakan gagal. Karena pada kenyataannya, angka partisipasi dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal tersebut tidak saja terjadi pada Pemilu Legislatif dan Pilpres, tetapi juga terjadi pada Pemilukada untuk memilih Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. Dalam konteks Gresik misalnya, dari tahun 1999 pasca Reformasi penurunan angka partisipasi sangat drastis.

Di beberapa negara maju, terutama Eropa dan Amerika, ditandai dengan fenomena bahwa semakin tinggi kualitas demokrasi suatu negara maka semakin rendah pula angka partisipasi politiknya. Semakin tinggi tingkat penghasilan dan pendidikan suatu bangsa maka semakin rendah pula angka partisipasinya. Sebaliknya, semakin rendah kualitas demokrasi atau pendidikan masyarakat maka semakin tinggi angka partisipasinya.

Dengan kejadian tersebut, para ahli berkesimpulan bahwa angka partisipasi bukanlah ukuran dalam menentukan kualitas demokrasi. Jika hal tersebut menjadi ukuran, maka demokrasi hanya dimaknai dengan angka partisipasi. Padahal partisipasi politik terkait dengan banyak aspek yang saling berhubungan dan mempengaruhi.

Partisipasi rendah pada umumnya terjadi pada pemilih pelajar, mahasiswa dan kalangan mapan. Semakin rasional dan kritis masyarakat

maka potensi untuk menjadi Golput semakin tinggi. Di Gresik, di mana segmen pemilih yang berumur 17 hingga 40 tahun cukup tinggi, maka potensi terjadinya Golput juga sangat tinggi. Satu sisi mereka sangat melek dengan informasi-informasi baru yang diakses dari berbagai sumber terutama internet, sisi yang lain Gresik merupakan kota besar dan penyanggah Metropolitan Surabaya. Segala potensi ada di Gresik yang memungkinkan masyarakat, terutama kalangan pelajar, mahasiswa, pencari kerja, kelas buruh berfikir kritis dalam merespons segala persoalan. Tabung informasi yang dikemas dan dikelola oleh masyarakat Gresik terutama yang berkaitan dengan isu-isu lokal, seperti pembangunan, industri, isu-isu politik daerah hingga pada ruang pekerjaan. Di sinilah yang membedakan Gresik dengan beberapa kota di Jatim, terutama kota-kota yang memiliki letak geografis cukup jauh dengan Surabaya.

Data-data di atas menggambarkan bahwa karakter pemilih dan pemilih pemula merupakan pemilih rasional. Mereka mereka memilih atas pertimbangan strategis, bukan karena janji atau pemberian hadiah. Sementara yang masuk dalam kategori pemilih pragmatis-skeptis cukup kecil, hanya berkisar 12 %. Sisi lain yang menjadi pendorong adalah sumber informasi untuk menentukan apakah akan memilih hingga siapa pilihannya bukanlah sumber-sumber formal melainkan kawan, sahabat dan teman curhat keseharian. Dalam konteks Gresik, 68 % menjadikan kawan, sahabat sebagai teman curhat untuk mendiskusikan isu-isu politik lokal. Artinya, yang menjadi referensi utama bukanlah guru, orang tua, KPUD dan pemerintah melainkan kawan dan sahabat. Aspek komunitas menjadi salah satu ruang utama dalam menentukan pilihan.

Pertanyaannya, bisakah semua informasi bisa masuk pada ruang-ruang privat atau komunitas yang terbatas? Jika pendidikan politik menjadi salah satu sasaran utama untuk meningkatkan partisipasi politik kelas pemilih pemula di sinilah letak taruhannya. Menjadi tugas KPUD untuk mencari celah bagaimana bisa masuk pada ruang-ruang politik yang bersifat privat, komunitas kecil yang diidentikkan dengan ruang sangat terbatas.

Pada ruang ini pendidikan politik sangat berhubungan dengan budaya masyarakat. Budaya yang berkembang di masyarakat memberikan andil terhadap budaya politik. Intensitas perjumpaan masyarakat pada ruang-ruang sosial seperti warung kopi maupun ruang sosial keagamaan seperti Masjid, Majelis Taklim dan Tarekat telah membentuk budaya politik baru yang disebut budaya politik komunitas. Budaya politik komunitas adalah budaya politik kritis dan sporadis. Satu sisi mereka sangat kritis terhadap isu-isu lokal, sisi lain dalam ketika komunitas menentukan keputusan berkecenderungan sporadis. Keputusan yang diambil dalam komunitas cenderung bersifat spontan dan sementara yang sangat mudah berubah-ubah.

Pemilih pemula berada pada ruang-ruang ini. Ruang yang sudah membentuk komunitas baru yang disebut budaya politik komunitas. Jika pendidikan dan kedewaan berpolitik akan dimaknai dengan peningkatan angka

partisipasi politik, maka tugas selanjutnya bagaimana dapat menembus ruang-ruang komunitas tersebut. Sosialisasi dan pendidikan politik terutama terhadap kalangan pemilih pemula dapat menembus ruang tersebut.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Pemilih pemula beranggapan bahwa mengikuti Pemilu merupakan kewajiban bagi setiap warga negara demi perubahan bangsa ke arah yang lebih baik. Mereka sependapat bahwa untuk melahirkan sistem kenegaraan yang baik diperlukan adanya partisipasi politik melalui ikut serta dalam Pemilu. Meskipun demikian, sebagian besar mereka belum tahu tata cara mencoblos yang benar sesuai dengan aturan, karena baru pertama kali ikut Pemilu, dan sebagian kecil yang sudah tahu. Terkait dengan Pemilukada yang akan dilaksanakan pada Desember 2015, sebagian besar belum mengetahuinya, dan hanya sebagian kecil yang sudah mengetahuinya. Dilihat dari aspek gender, kaum laki-laki lebih melek dan respon terhadap isu-isu politik terutama keikutsertaan dalam Pemilukada. Pada aspek ini tidak terjadi disparitas yang tajam antar masing-masing wilayah di Kabupaten Gresik, antara wilayah selatan, tengah dan utara.
2. Pemilih pemula dalam Pemilukada Gresik sebagian besar digolongkan dengan pemilih rasional. Yakni memiliki atas dasar pertimbangan kapasitas dan kompetensi pada pemimpin yang dipilih. Hanya sebagian kecil yang dikategorikan pemilih emosional dan akeptis yakni memilih karena faktor kedekatan ideologis, janji dan pemberian hadiah. Terjadi disparitas yang cukup menonjol antar masing-masing wilayah di Kabupaten Gresik, antara wilayah selatan, tengah dan utara. Meskipun secara umum dikategorikan rasional, namun di wilayah selatan tingkat skeptisnya lebih tinggi. Pemilih yang didasarkan pada janji dan pemberian hadiah lebih menonjol dibandingkan dengan tengah dan utara. Sementara di bagian utara menonjol memilih karena kedekatan ideologis dan budaya.
3. Sumber informasi tentang Pemilukada dan Para Kandidat yang akan berkompetisi sebagian besar diperoleh dari dari kawan, sahabat dan obrolan informal. Sementara sumber-sumber resmi seperti KPUD, PPK, PPS dan spanduk/baliho bukan menjadi prioritas utama dalam mengakses informasi. Demikian pula informasi yang bersumber dari Koran/majalah/media online tidak menjadi prioritas utama yang dapat memberikan pemahaman kepada pemilih pemula tentang urusan kepemiluan.

B. Rekomendasi

Berdasarkan temuan hasil penelitian di atas, maka direkomendasikan sebagai berikut :

1. Kepada KPU/PPK/PPS.
 - a. Kepada KPU/PPK/PPS. Untuk meningkatkan sosialisasi pada pemilih pemula, terutama pelajar dan mahasiswa. Karena keterpelajaran tidak serta merta berbanding lurus dengan pengetahuan mereka tentang pemilu dan calon yang akan dipilih. Hal yang sama juga perlu dilakukan pada pemilih perempuan.
 - b. Kepada KPU/PPK/PPS. Perlu variasi dalam sosialisasi tentang Pemilu terutama Pilkada. Perlu dilakukan kerjasama dengan Ormas, OKP, LSM, Pesantren, lembaga pendidikan, perusahaan untuk melakukan pendidikan politik masyarakat.
2. Kepada Pemkab/Kecamatan/Desa/Kelurahan
Agar membangun sinergi dengan KPU/PPK/PPS dalam meningkatkan pengetahuan politik dan partisipasi terutama bagi kalangan pemilih perempuan, masyarakat yang berpendidikan SMA ke bawah dan kaum perempuan. Meskipun disparitas pengetahuan tentang Pemilu tidak terlalu tajam, namun yang terjadi di Kabupaten Gresik cukup mencolok

DAFTAR PUSTAKA

- Asfar, Muhammad, *Pemilu dan Prilaku Pemilih 1955-2004*. Surabaya:Pustaka Uereka dan PusdeHAM, 2006
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2007
- Chalik, Abdul, *NU dan Geopolitik;Perubahan dan Kesenambungan*. Yogyakarta:IMPULSE, 2011
- , *Islam dan Kekuasaan*, Yogyakarta:Interpena, 2012.
- ., *Geopolitik*. Surabaya:UINSA, 2014
- Cole, Stephen, *The Sociological Method:An Introduction to The Science of Sociology* Chicago:RandMcNally Company, 1980
- Dahl, Robert A., *Modern Political Analysis*. New Delhi:Prentice-Hall of India Limited, 1979
- Duverger, Maurice, *Sosiologi Politik*, ter. Daniel Dhakidae. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2005
- Hikam, Muhammad AS, *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta:LP3ES, 1996

Haris, Syamsuddin (ed.), *Pemilihan Langsung di Tengah Oligarki Partai; Proses Nominasi dan Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005

Michael Rush, Philip Althoff, *Pengantar Sosiologi Politik*, ter. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Saiful Mujani, R. William Liddle, Kuskrindo Ambardi, *Kuasa rakyat*. Jakarta: Mizan, 2011

Silvia Bolgherini, "Participation" dalam Mauro Calise and Theodore J. Lowi, *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concept*. Chicago: The University of Chicago, 2010

Alamsyah, "Pemilih Pemula dalam Pemilu 2014", Ekpress Pos, 18 September 2014.
"Pemilih Pemula", Antara.Com. (2 Januari 2015)

Alamsyah, "Pemilih Pemula dalam Pemilu 2014", Ekpress Pos, 18 September 2014.

Mariyadi, *Statistik daerah kabupaten gresik 2013* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2013), 1

Katalog BPS kabupaten gresik, *Gresik Dalam Angka 2010* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2010), 33

Katalog BPS kabupaten gresik, *Gresik Dalam Angka 2011* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2011), 31

Katalog BPS kabupaten gresik, *Gresik Dalam Angka 2012* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2012)

Katalog BPS Kabupaten gresik, *Gresik Dalam Angka 2013* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2013), 35

Mariyadi, *Statistik daerah kabupaten gresik 2013* (Gresik: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gresik, 2013), 4

